



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jaksa Agung;
  6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  9. Kepala Badan Pusat Statistik;
  10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  11. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  12. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
  13. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
  14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;

15. Kepala ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

15. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
16. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;
18. Para Gubernur;
19. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

**PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pelaksanaan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, dan hasil Rapat Kerja antara Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur pada tanggal 2-3 Februari tahun 2010.

**KEDUA** : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;

6. Infrastruktur ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik;
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi;
12. Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan;
13. Prioritas lainnya di bidang perekonomian;
14. Prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan kebijakan di bidang ekonomi, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta kebijakan lain di bidang perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengoordinasikan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan terutama dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, serta kebijakan lain di bidang politik, hukum dan keamanan;

3. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, serta kebijakan lain di bidang kesejahteraan rakyat.

KEEMPAT : Para Menteri dan Kepala Lembaga, yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, mengoordinasikan pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

KEENAM : Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala pelaksanaan program-program yang berada di bawah koordinasinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Presiden, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

KETUJUH : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya



Wakil Sekretaris Kabinet,

Bambang Y. Nahattands



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1 TAHUN 2010  
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2010

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Konsolidasi struktur organisasi Kementerian/Lembaga (K/L) dan BUMN	Grand Design reformasi birokrasi nasional dan kebijakan pelaksanaannya	Tersusunnya <i>grand design</i> dan <i>road map</i> reformasi birokrasi	100%	Maret 2010	Tercapainya peningkatan efektivitas dan efisiensi K/L dan BUMN	Kemen PAN dan RB	
		Pedoman/juknis pelaksanaan	100%	Desember 2010			
	Restrukturisasi BUMN	100%	Desember 2010	Kemen BUMN			
Penataan otonomi daerah	Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah	Tersusunnya strategi dasar penataan daerah	100%	Desember 2010	Terwujudnya pemantapan otonomi daerah	Kemendagri	Semua daerah
	Penyempurnaan UU penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah	Ditetapkannya revisi UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu	100%	Desember 2010		Kemendagri	
		Revisi terbatas UU 32/2004 terkait dengan pelaksanaan Pilkada; ditetapkannya UU tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	Desember 2010		Kemendagri	
	Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan per UU-an di tingkat pusat dan daerah	Jumlah perda yang dikaji dan rekomendasi tindak lanjut hasil kajian (disetujui, direvisi, dibatalkan)	kajian 3000 perda	Desember 2010		Kemendagri	Daerah terkait
		Penetapan hasil harmonisasi dan sinkronisasi peraturan per UU-an di bidang tata ruang	100%	Desember 2010		Kemen PU	Semua daerah
		Hasil inventarisasi peraturan per-UU an sektor yang belum sejalan dengan peraturan per-UU an otonomi daerah di Pusat dan Daerah	100%	Desember 2010		Kemendagri	Semua daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
Penetapan dan penerapan Sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Jumlah kumulatif SPM yang ditetapkan	13 SPM	Desember 2010	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Kemendagri		
		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh daerah	5 SPM	Desember 2010				Kemendagri
Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Pemberian NIK kepada setiap penduduk	Jumlah kab/kota yang memberikan NIK kepada setiap penduduk	329 kab/kota	Desember 2010	Tercapainya pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan dalam 3 tahun	Kemendagri	Kab/kota terkait	
	Pemberian e-KTP berbasis NIK	Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK	4,2jt jiwa di 6 kab/kota	Desember 2010				
Pemantapan pengadaan barang dan jasa	Penguatan peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	Tersusunnya RUU tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 RUU	Desember 2010	Terwujudnya peningkatan efisiensi belanja negara	LKPP		
		Terlaksananya sosialisasi Perpres pengganti Keppres 80/2003 bagi seluruh instansi pusat dan daerah	100%	Desember 2010				LKPP
	Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terbentuknya LPSE baru di K/L/D/I dengan koordinasi LKPP	100 LPSE	Desember 2010				LKPP



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi	Peningkatan sistem manajemen BOS	Tersusun dan teraplikasikannya sistem manajemen BOS	100%	Desember 2010	Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau	Kemendiknas	
		Tersusun dan teraplikasikannya sistem manajemen BOS madrasah	100%	Desember 2010		Kemenag	
	Penyediaan buku ajar yang bermutu dan murah melalui pembelian hak cipta	Persentase mata pelajaran SD/ sederajat yang dibeli hak ciptanya (total 78 jilid mapel)	100%	Desember 2010		Kemendiknas	
		Persentase mata pelajaran SMP/ sederajat yang dibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel)	100%	Desember 2010			
		Persentase mata pelajaran SMA/ sederajat yang dibeli hak ciptanya (total 93 jilid mapel)	100%	Desember 2010			
		Persentase mata pelajaran SMK yang dibeli hak ciptanya (total 493 jilid mapel)	52%	Desember 2010			
Perbaikan status gizi anak sekolah	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk siswa TK/RA dan siswa SD/MI terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan	Jumlah siswa TK dan SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS	1.200.000 siswa	Desember 2010	Membatkannya gizi bagi siswa TK/RA dan SD/MI melalui PMTAS	Kemendiknas	Daerah terkait
		Jumlah siswa RA dan MI di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS	180.000 siswa			Kemenag	Daerah terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan metodologi dan kurikulum	Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	Terimplementasinya uji coba kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	100%	Desember 2010	Terwujudnya kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa	Kemendiknas	Daerah terkait
Penguatan pengelolaan sekolah	Peningkatan kompetensi kepala dan pengawas sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah	Persentase kepala TK/SD yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15%	Desember 2010	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah/madrasah sebagai satuan pendidikan unggul	Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase kepala RA/MI yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	10%	Desember 2010		Kemenag	Kab/Kota terkait
		Persentase kepala SMP yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15%	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase kepala MTs yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	10%	Desember 2010		Kemenag	Kab/Kota terkait
		Persentase kepala SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15%	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase kepala MA yang sudah mengikuti pelatihan kepala madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	10%	Desember 2010		Kemenag	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas TK/SD yang sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	100%	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas RA/MI yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	10%	Desember 2010		Kemenag	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas SMP yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	100%	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas MTs yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah	15%	Desember 2010		Kemenag	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	100%	Desember 2010		Kemendiknas	Kab/Kota terkait
		Persentase pengawas MA yang sudah mengikuti pelatihan pengawas madrasah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota	15%	Desember 2010		Kemenag	Kab/Kota terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan pendidikan agama	Peningkatan kualitas guru agama dan relevansi pendidikan di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi agama	Persentase guru agama Islam yang mengikuti pelatihan kompetensi	10%	Desember 2010	Meningkatnya kualitas pendidikan agama	Kemenag	
		Jumlah siswa MA yang mengikuti program pemagangan di dunia usaha/dunia industri	5,000	Desember 2010		Kemenag	
		Jumlah santri yang mengikuti program pemagangan di dunia usaha/dunia industri	1,000			Kemenag	
		Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pemagangan di dunia usaha/dunia industri	500			Kemenag	
		Penyusunan Standar Nasional Pendidikan bagi pendidikan agama dan keagamaan	Penyusunan Standar	Desember 2010		Kemenag	
Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan	Akselerasi penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan di setiap jenjang pendidikan	Satuan pendidikan yang menerapkan sistem penjaminan mutu	10.000	Desember 2010	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan	Kemendiknas	
		Jumlah PT masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional	8	Desember 2010		Kemendiknas	
		Jumlah PT yang mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship	95	Desember 2010		Kemendiknas	
	Penerapan pembelajaran berbasis TIK di sekolah	Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	40%	Desember 2010		Kemendiknas	
		Persentase satuan pendidikan jenjang SMP menerapkan pembelajaran berbasis TIK	20%	Desember 2010		Kemendiknas	
	Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan E-Government di sekolah (e-pendidikan)	Jumlah sekolah di 5 kab/kota provinsi DIY yang memiliki sistem e-pendidikan	50 sekolah	Desember 2010		Kemenkominfo	Pemda DIY



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 3 : KESEHATAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>2</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>3</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan upaya kesehatan preventif terpadu	Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi	Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN))	84	Desember 2010	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Kemenkes	
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))	84	Desember 2010			
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	10	Desember 2010			
	Pembinaan pelayanan kesehatan anak	Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	84	Desember 2010		Kemenkes	
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi	84	Desember 2010			
		Cakupan pelayanan kesehatan balita	78	Desember 2010			
	Pembinaan imunisasi dan karantina kesehatan	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	80	Desember 2010		Kemenkes	
	Pengembangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	8,000	Desember 2010		Kemenkes	kab/kota terkait
	Peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi	Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	85	Desember 2010		Kemenkes	
		Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum	159 ibukota kec, 18 kawasan khusus perbatasan dan 1.472 desa	Desember 2010		Kemen PU	kab/kota terkait



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

PRIORITAS 3 : KESEHATAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan sanitasi (air limbah dan drainase)	9 kab/kota sistem air limbah <i>off-site</i> , 10 kab/kota penanganan drainase	Desember 2010		Kemen PU	kab/kota terkait
Pengawasan obat dan makanan	Penguatan upaya pengawasan obat dan makanan	Jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diperiksa di 31 balai besar/Balai POM	15,000	Desember 2010	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia	Badan POM	
Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	Penataan kelembagaan Jaminan Sosial Nasional	Tersusunnya/disahkannya perangkat hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi: (1) Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); (2) PP Penerima Bantuan Iuran (PBI); (3) Perpres Jaminan Kesehatan	100%	Desember 2010	Berkembangnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	Kemenko Kesra	
Penyediaan obat esensial nasional	Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	80	Desember 2010	Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan	Kemenkes	
Pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan	Penempatan tenaga kesehatan strategis di fasilitas kesehatan (Puskesmas di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan/DTPK dan Rumah Sakit) secara merata	Tersusunnya kebijakan dan peraturan perundangan mengenai masa bakti tenaga kesehatan strategis setelah lulus perguruan tinggi dan spesialisasi terutama di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	100%	Desember 2010	Tersedianya 1200 tenaga kesehatan di Puskesmas Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan di Rumah Sakit	Kemenkes	kab/kota terkait
		Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	1200	Desember 2010			



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

**PRIORITAS 3 : KESEHATAN**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>*)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>*)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Revitalisasi Program Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan intensitas pelayanan dan promosi program KB secara nasional	Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan sarana prasarana	4,700	Desember 2010	Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)	BKKBN	
		Persentase PUS, WUS, dan remaja yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang	95%	Desember 2010			
	Penguatan SDM dan kelembagaan yang menangani KB di daerah	Jumlah Tenaga Lini Lapangan Program KB (PLKB/PKB) yang terlatih:		Desember 2010		BKKBN	
		a. Latihan Dasar Umum (LDU)	1.065				
		b. <i>Refreshing</i>	1.350				
c. Pelatihan teknis	3.018						



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>2)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>3)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berpendapatan rendah	Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	59	Desember 2010	Menurunnya angka kemiskinan	Kemenkes	
		Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	8,481	Desember 2010		Kemenkes	Semua kab/kota
		Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas	75	Desember 2010		Kemenkes	Daerah terkait
	Peningkatan intensitas pelayanan KB bagi masyarakat berpendapatan rendah	1. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokasi gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta	3,75 juta orang	Desember 2010		BKKBN	Daerah terkait
		2. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokasi gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta	11,9 juta orang	Desember 2010			
	Penyediaan beasiswa pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah	Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin	2,767,300	Desember 2010		Kemendiknas	
		Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin	966,100	Desember 2010		Kemendiknas	
		Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin	378,800	Desember 2010		Kemendiknas	
		Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin	305,550	Desember 2010		Kemendiknas	
		Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin	65,000	Desember 2010		Kemendiknas	
Jumlah siswa MI miskin penerima beasiswa		750,000	Desember 2010	Kemenag			
Jumlah siswa MTs miskin penerima beasiswa		600,000	Desember 2010				
Jumlah siswa MA miskin penerima beasiswa	400,000	Desember 2010					
Bantuan Beasiswa Bakat dan prestasi siswa MTs	1,000	Desember 2010					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Bantuan Beasiswa untuk siswa MA melanjutkan ke PTAN	2,000	Desember 2010			
		Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa PTA	70,000	Desember 2010		Kemenag	
	Penguatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Evaluasi PKH	1	Desember 2010		Kemensos	Daerah terkait
		Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH;	816 ribu RTSM	Desember 2010			
	Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah (RASKIN)	Jumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)	17,5 juta	Desember 2010		Kemenko Kesra	Semua daerah
	Pelaksanaan redistribusi tanah	Jumlah bidang tanah	210,000	Desember 2010		BPN	
	Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja (kegiatan padat karya produktif)	Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara	24.000 orang	Desember 2010		Kemenakertrans	
		Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara	231 Kab/Kota	Desember 2010			Kab/kota terkait
	Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	3,000	Desember 2010		Kemenakertrans	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat dan anak serta pelayanan sosial bagi lansia	Jumlah penyandang cacat yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa)	34,900	Desember 2010		Kemensos	Daerah terkait
		Jumlah anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa)	159,500	Desember 2010			
		Jumlah lanjut usia terlantar yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti (jiwa)	22,040	Desember 2010			
Pemantapan PNPM mandiri	Penyusunan rencana integrasi program pemberdayaan masyarakat lainnya ke dalam PNPM	Konsep rencana integrasi PNPM Inti dan Penguatan	100%	Desember 2010	Meningkatnya efektifitas PNPM Mandiri	Tim Pengendali PNPM Mandiri	
	Pemantapan pelaksanaan PNPM Inti	Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan sosial	8.500 kel, 884 kec di 246 kota	Desember 2010		Kemen PU	Daerah terkait
		Cakupan penerapan PNPM-MP dan penguatan PNPM	4791 kec	Desember 2010		Kemendagri	Daerah terkait
		Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di kab. Nias dan Nias Selatan	2 kab/9 kec.	Desember 2010		Kemen PU	Kab Nias/Nias Selatan
		Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial	237	Desember 2010			Daerah terkait
		Jumlah kabupaten daerah tertinggal	51 kabupaten	Desember 2010		KPDT	Daerah terkait
	Peningkatan integrasi PNPM Penguatan	Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem <i>on-site</i> (kab/kota)	30 kab/kota	Desember 2010		Kemen PU	Daerah terkait
Jumlah desa yang terfasilitasi air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat		1.472 desa	Desember 2010	Kemen. PU	Daerah terkait		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

**PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	120 kab/kota	Desember 2010		Kemen KP	Daerah terkait
		Jumlah gapoktan PUAP (unit)	10,000	Desember 2010		Kementan	Daerah terkait
		Jumlah desa yang dikembangkan	200 desa	Desember 2010		Kemenbudpar	Daerah terkait
Perluasan pelayanan KUR	Peningkatan dukungan penjaminan dan perluasan jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Tersedianya anggaran penjaminan KUR	Penerbitan PP Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo	Desember 2010	Meningkatnya efektifitas cakupan KUR	Kemenkeu (Anggaran 99)	
		Penyaluran KUR oleh Bank Pembangunan Daerah	13 Provinsi	Desember 2010		Kemenko Perekonomian/ Kemen KUKM	Daerah terkait
		Peningkatan pangsa penyaluran KUR kepada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, perindustrian	25%	Desember 2010		Kemenko Perekonomian	
Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan	Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan	Pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	1	Juni 2010	Terbentuknya struktur dan kelengkapan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Timnas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

**PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>3)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>4)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Peningkatan kualitas <i>targeting</i> dan data Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Evaluasi dan analisa efektifitas sistem <i>targeting</i>	0.75	Desember 2010	Penyempurnaan pendataan RTS	Timnas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	
		Penyusunan SOP untuk <i>targeting</i>		Desember 2010			
		<i>Draft design</i> pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011		Desember 2010			



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 15 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan produksi pangan	Pelaksanaan audit lahan pertanian baik luasan maupun potensi	Peta lahan baku sawah	1 paket	Desember 2010	Meningkatnya produksi dan produktivitas bahan pangan	Kementan	
		Audit lahan sawah	1 paket	Desember 2010		Kementan	
	Penataan pemilikan lahan dan pengendalian konversi	Peraturan Pemerintah tentang Pemilikan Lahan dan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian.	4 PP	Desember 2010		Kementan	
	Pengelolaan air untuk pertanian	Tersedianya optimasi pemanfaatan air irigasi melalui perbaikan JITUT, JI-DES dan pengembangan TAM yang berfungsi (ha)	57.464 ha; 45.102 ha; 5.920 ha	Desember 2010		Kementan	Daerah terkait
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas layanan jaringan irigasi yang meningkat (ha)	115 ribu ha	Desember 2010		Kemen PU	Daerah terkait
		Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (ha)	200 ribu ha	Desember 2010		Kemen PU	
		Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (ha)	2.315 ribu ha	Desember 2010		Kemen PU	
		Luas layanan jaringan rawa yang meningkat (ha)	8,1 ribu ha	Desember 2010		Kemen PU	
		Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (ha)	85 ribu ha	Desember 2010		Kemen PU	
		Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara (ha)	1.200 ribu ha	Desember 2010		Kemen PU	
		Luas layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan (ha)	234 ha	Desember 2010		Kemen PU	
		Luas layanan jaringan irigasi air tanah yang di OP (ha)	555 ha	Desember 2010		Kemen PU	
	Luas layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ditingkatkan (ha)	6.785 ha	Desember 2010	Kemen PU			
	Peningkatan akses petani/peternak terhadap Kredit Program (KUR, KUPS, KHPE, KPN-RP)	1) SE Menteri, Gubernur, Bupati; 2) SE Bank Indonesia; 3) SE Direksi Bank yang bersangkutan; 4) Bahan dan kegiatan sosialisasi, PSA di tingkat desa	1 paket	Desember 2010		Kementan	Semua daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>2</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>3</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
	Pemantapan sistem penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk	245 SKPD	Desember 2010		Kementan	Daerah terkait	
		Jumlah kelembagaan petani (Gapoktan)	2.830 kelompok	Desember 2010				
		Jumlah BPP model	336 BPP	Desember 2010				
		Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang berkualitas (orang)	27.393 org	Desember 2010				
	Peningkatan produksi ternak ruminansia	Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian		30%		Desember 2010	Kementan	Daerah terkait
		Pengembangan sapi bibit potong	21.000 ekor	Desember 2010				
		Pengembangan bibit sapi perah	1.250 ekor	Desember 2010				
	Penyediaan kapal nelayan di berbagai daerah	Pengembangan integrasi tanaman ternak		75 unit		Desember 2010	Kemen KP	Daerah terkait
		Mekanisme pelaksanaan dan monev pemberian kapal nelayan dan jumlah kapal yang diberikan kepada nelayan		60 unit		Desember 2010		
	Penyaluran subsidi benih tanaman pangan	Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)		178,18		Desember 2010	Kementan	
	Penyaluran pupuk bersubsidi	Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)		11,06		Desember 2010	Kementan	
	Uji coba pengalihan subsidi pupuk langsung ke petani	Finalisasi kajian uji coba subsidi langsung		1 paket		Juni 2010	Kementan	
Rancang bangun subsidi pupuk langsung ke petani		1 paket	Desember 2010					
<i>Pilot project</i> subsidi pupuk langsung ke petani		1 kabupaten	Desember 2010					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengembangan lahan pangan skala luas (seperti <i>food estate</i> ) yang ramah lingkungan dan tidak merusak pranata sosial setempat	Pemantapan <i>Grand Design Food Estate</i> Papua;	1 paket	Juni 2010		Kementan	Provinsi Papua/Kab Merauke
		Peraturan Menteri Pertanian tentang Usaha Budidaya Tanaman;	1 paket	Juni 2010		Kementan	
		Peraturan Menteri Pertanian tentang Perijinan;	1 paket	Juni 2010		Kementan	
		PP Kawasan Ekonomi Khusus;	1 paket	Juni 2010		Kemenko Perekonomian	
		Peraturan lainnya di bidang Penataan Kawasan dan Pertanahan (RUTR);	1 paket	Juni 2010		Daerah	
		Promosi dan persiapan investasi serta <i>demonstration plot (Demplo)</i>	1 paket	Desember 2010		Kementan	
Revitalisasi industri pertanian	Revitalisasi industri pupuk	Tersusunnya alokasi pasokan gas bumi untuk revitalisasi industri pupuk urea (PKT 5, 1 pabrik di Tangguh dan 1 pabrik di Donggi Senoro)	Alokasi gas untuk 3 pabrik	Desember 2010	Meningkatnya kapasitas produksi dan efisiensi produksi industri pertanian	Kemen ESDM	
		Indikasi kesediaan pemasokan bahan baku dari negara yang mempunyai sumber bahan baku <i>Phosphate</i> dan <i>Kalium</i> untuk pabrik pupuk NPK (Yordan, Tunisia, Maroko, Mesir dan Rusia)	Maksimal 5 negara	Desember 2010		Kemenperin	
		Terusunnya <i>Master Plan</i> Pengembangan Industri Pupuk NPK	1 paket	Desember 2010		Kemenperin	
		Tersedianya peta potensi bahan baku pupuk organik di daerah	1 paket	Desember 2010		Kemenperin	
	Revitalisasi industri gula	Terlaksananya revitalisasi PG yang ada (BUMN dan Swasta)		Desember 2010		Kemenperin	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

**PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Pemenuhan konsumsi pangan dan kualitas gizi masyarakat	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan.	1.750 desa	Desember 2010	Meningkatnya ketahanan pangan dan kualitas gizi masyarakat	Kementan	Kab/kota terkait
		Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan.	800 lumbung	Desember 2010			Kab/kota terkait
		Penanganan daerah rawan pangan.	350 kab	Desember 2010			Kab terkait
		Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	33 prop	Desember 2010			Seluruh provinsi
		Pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan.	33 prop	Desember 2010			
	Percepatan penganeka ragam konsumsi pangan	Terbinanya kelompok wanita dalam konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang	2000 desa	Desember 2010		Kementan	Daerah terkait
		Pengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan non beras dan terigu	2000 kelompok	Desember 2010			Daerah terkait
		Sosialisasi dan promosi penganeka ragam konsumsi pangan	200 kabupaten	Desember 2010			Kab terkait
		Berkembangnya teknologi pengolahan pangan lokal	33 provinsi	Desember 2010			Seluruh provinsi
	Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan.	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	750 kelompok	Desember 2010		Kementan	Daerah terkait
		Data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan.	33 prop	Desember 2010			Seluruh provinsi
		Laporan pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan.	33 prop	Desember 2010			Seluruh provinsi
Peningkatan efisiensi pasar komoditi pangan	Pembangunan gudang-gudang pangan dan penyediaan peralatannya serta fasilitasi efektivitas pemanfaatannya	Tersusunnya <i>masterplan</i> pengembangan gudang-gudang pangan	1 paket	April 2010	Meningkatnya efisiensi distribusi dan logistik	Kemendag	
		Tersedianya gudang-gudang pangan sesuai SK Mendag (jagung, beras, gabah, kopi, kakao, rumput laut, lada) di sentra-sentra produksi tingkat kabupaten/kota	12 gudang komoditi	6 bulan (Mei-November 2010)			Kemendag



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 19 -

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Tersedianya peralatan berupa dryer , tester, alat penguji mutu, dan alat pengolah data di 35 gudang yang telah dibangun pada tahun 2009.	35 paket	6 bulan (Mei-November 2010)		Kemendag	
		Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan di 34 daerah, serta tersedianya modul pelatihan, modul monitoring & evaluasi, serta materi promosi.		7 bulan (Mei-Desember 2010)		Kemendag	Daerah terkait
Pelaksanaan Reforma Agraria dan penataan pertanahan nasional	Penyusunan RUU dan Peraturan Pemerintah terkait pertanahan mencakup sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait pertanahan	Terbitnya PP Reforma Agraria yang mengatur: a) penataan sistem hukum dan politik b) pelaksanaan <i>land reform plus</i> , pemberian akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya	1 PP	April 2010	Meningkatkan pengelolaan pertanahan nasional	BPN	
		Terlaksananya sosialisasi PP Penertiban Tanah Terlantar dan PP Reforma Agraria	33 prop	Desember 2010		BPN	
		Tersusunnya RUU Pertanahan yang akan mencakup (1) sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan terkait tanah, seperti UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU Budi Daya, UU Pertambangan, Mineral & Batubara, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perkebunan, UU Penataan Ruang dan (2) Pengaturan penataan tanah masyarakat hukum adat dalam sistem keagrariaan nasional	1 RUU	Desember 2010		BPN	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

**PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>7)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>8)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah	Sertifikasi tanah	495.620 bidang tanah (Prona sebanyak 139.620 bidang, UKM 30.000 bidang, Pertanian 23.000 bidang, DKP 30.000 bidang, Transmigrasi 30.000 bidang)	Desember 2010		BPN	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>2)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>3)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Penataan tata ruang dan pertanahan	Percepatan penyelesaian RTRW provinsi, kabupaten dan kota serta Kawasan Strategis Nasional	Terselesaikannya permasalahan RTRW Provinsi yang sudah masuk dalam forum BKPRN	17 RTRW Provinsi, 36 RTRW Kab dan 20 RTRW Kota	Desember 2010	Tersedianya informasi tata ruang dan peta pemanfaatan tanah yang lebih baik	Kemen PU, Pemerintah Prov. dan Pemerintah Kab/Kota	Daerah terkait
		Terselesaikannya Perda RTRW Provinsi yang tidak bermasalah					
		Identifikasi dan menyusun rencana tindak untuk penyelesaian Perda RTRW Kabupaten/Kota					
		Terselesaikannya Perda RTRW Kab/Kota yang tidak bermasalah					
		Jumlah penetapan Perpres RTRW Kawasan Strategis Nasional (Perbatasan antar negara pulau besar dan kepulauan, dan metropolitan)	9 Raperpres	Desember 2010		Kemen PU	Daerah terkait
		Tersedianya data dan informasi pemanfaatan lahan eksisting hasil audit nasional pemanfaatan lahan, terutama kawasan hutan	7 Prop	Desember 2010		Kemen PU	Provinsi terkait
	Pengadaan lahan untuk kepentingan umum	RUU Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	1 RUU	Desember 2010		BPN	
	Peningkatan keterpaduan pemetaan nasional	Jumlah simpul jaringan di pusat	14	Desember 2010		Bakosurtanal	Daerah terkait
		Jumlah simpul jaringan di provinsi	6	Desember 2010			
		Jumlah simpul jaringan di kab/kota	50	Desember 2010			
Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul		1	Desember 2010				
Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDS N		1	Desember 2010				
Jumlah metadata simpul jaringan pusat		3,000	Desember 2010				
Jumlah metadata simpul jaringan provinsi	3,000	Desember 2010					
Jumlah metadata simpul jaringan kab/kota	4,000	Desember 2010					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>2</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>3</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan <i>domestic connectivity</i>	Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT serta pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional	Panjang penyelesaian jalan lintas yang mendapat peningkatan kapasitas, yang terdiri dari :	1.579,79 km	Desember 2010	Meningkatnya kelancaran distribusi barang dan jasa	Kemen PU	Daerah terkait
		- Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran)	1.368,72 km	Desember 2010		Kemen PU	
		- Panjang jalan <i>lingkar/bypass</i> yang dibangun	18,4 km	Desember 2010		Kemen PU	
		- Panjang jembatan yang dibangun	4.921 m	Desember 2010		Kemen PU	
		- Panjang jalan strategis di lintas selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun	184 km 491 m	Desember 2010		Kemen PU	
		- Panjang <i>flyover/underpass</i> yang dibangun	3.262 m	Desember 2010		Kemen PU	
		Terbentuknya unit pengelola dana preservasi jaringan jalan	100%	Juli 2010		Kemen PU	
		Panjang jalan yang dipreservasi	32.349 km	Desember 2010		Kemen PU	
		Panjang jembatan yang dipreservasi	9.235,7 m	Desember 2010		Kemen PU	
		Penyusunan Sistem Transportasi Nasional dan cetak biru transportasi multi moda	Studi tinjau ulang arah kebijakan Sistranas dan Tatranas	2 dokumen		Desember 2010	
	Studi implementasi cetak biru transportasi antar moda/ multi moda		1 dokumen	Desember 2010		Kemenhub	
	<i>Masterplan</i> Integrasi Sistem Tiket Elektronik Transportasi untuk wilayah Jabodetabek sesuai cetak biru Transportasi Perkotaan di 4 kota besar		1 dokumen	Desember 2010		Kemenhub	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Penyempurnaan kelembagaan dan peraturan untuk mendukung pembangunan infrastruktur	Terbitnya Revisi Keputusan Menteri Keuangan untuk merubah BLU bidang pendanaan jalan tol menjadi BLU pendanaan <u>pengembangan jalan bebas hambatan</u>	100%	Desember 2010		Kemen PU	
		Terselesainya konsep pembentukan struktur dan tupoksi lembaga penyedia tanah untuk pembangunan infrastruktur dan <u>kepentingan umum lainnya</u>	100%	Desember 2010		Kemen PU	
	Pembangunan terminal antar negara dan antar provinsi	Terbangunnya terminal (2 selesai, 3 baru, 9 lanjutan)	14 lokasi	Desember 2010		Kemenhub	Daerah terkait
	Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana KA	Terbangunnya jalur KA baru termasuk jalur ganda	89,2 km	Desember 2010		Kemenhub	Daerah terkait
		· Peningkatan persinyalan KA lintas Medan – Belawan	1 paket	Desember, 2010		Kemenhub	Pemprov Sumut
		· DED pembangunan jalur KA Waru - Bandara Juanda	1 dokumen	November, 2010		Kemenhub	Pemprov Jatim
	Pembangunan Bandara Kualanamu	Pembangunan sisi udara dan sebagian fasilitas operasi bandara (sisi darat) panjang <i>runway</i> 3750 x 60	74%	Desember 2010		Kemenhub	Pemprov Sumut
	Penyelesaian MRT dan kelanjutan proyek <i>monorail</i> di Jakarta	<i>Basic design</i> MRT Jakarta	100%	Desember 2010		Kemenhub	Pemprov DKI Jakarta
		Terselesainya perhitungan investasi yang telah dilakukan oleh swasta bagi kelanjutan proyek <i>monorail</i>	100%	Akhir Maret 2010			Pemprov DKI Jakarta
		Konsep dan proposal pembangunan proyek <i>monorail</i>	100%	Agustus 2010			Pemprov DKI
Pengembangan perumahan dan permukiman	Pembangunan rumah susun sederhana sewa	Jumlah rusunawa terbangun ( <i>Twin Block</i> ) untuk pekerja, pegawai dan mahasiswa	40	Desember 2010	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah.	Kemenpera	Daerah terkait
		Jumlah rusunawa terbangun ( <i>Twin Block</i> ) di kawasan kumuh	40	Desember 2010		Kemen PU	Daerah terkait
	Pembangunan rumah layak huni bersubsidi	Jumlah rumah layak huni yang tersedia berupa rumah sederhana sehat bersubsidi (unit)	150.000	Desember 2010		Kemenpera	Daerah terkait
		Jumlah rumah layak huni yang tersedia berupa rusunami bersubsidi (unit)	30.000	Desember 2010		Kemenpera	Daerah terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

**PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Pengendalian banjir	Penyelesaian Kanal Banjir Timur	Terselesaikannya pembangunan KBT konstruksi utama paket 22 - 29	100%	Desember 2010	Mengurangi potensi banjir pada daerah rawan banjir	Kemenkeu (BA. 999)	Pemprov DKI Jakarta
	Pembangunan waduk dan prasarana pengendali banjir DAS Bengawan Solo	Terselesaikannya Waduk Gonggang	100%	Desember 2010		Kemen PU	Pemprov Jateng
		Tersedianya prasarana pengendalian banjir (pompa air di 1 lokasi 2 unit pompa)	100%	Desember 2010		Kemen PU	
Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	Penyusunan <i>ICT Fund</i> untuk membiayai pembangunan jaringan <i>backbone</i> serat optik	Prosentase penyelesaian penyusunan dan pembahasan <i>ICT Fund</i> dan optimalisasi PNBPN untuk pembiayaan jaringan <i>backbone</i> serat optik	100%	Desember 2010	Meningkatkan jangkauan dan kualitas jaringan informasi dan komunikasi	Kemenkominfo	
Peningkatan Penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP	Penyusunan kebijakan, peraturan, kelembagaan dan pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur dengan skema KPS/PPP	Kajian sistem penyediaan dana pembebasan tanah baik berupa dana talangan (non APBN) untuk proyek KPS yang layak secara finansial dan dukungan fiskal (APBN) untuk proyek KPS yang kurang layak secara finansial	100%	Agustus 2010	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dengan skema KPS/PPP	BPN	
		Kajian dan tindak lanjutnya bagi pembentukan unit penyedia dana talangan untuk pembebasan tanah di masing-masing Kementerian/Lembaga yang memiliki proyek KPS atau di satu Kementerian/Lembaga	100%	November 2010		Kemenkeu	
		Unit dan mata anggaran (APBN) penyediaan dana dukungan fiskal untuk pembebasan tanah	100%	Oktober 2010		Kemenkeu	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan pembangunan Wilayah Papua	Pembangunan jalan	Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur	100%	Juni 2010	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua	Kemenkeu	
		Kajian pemberian dukungan fiskal pemerintah non tanah (sebagian konstruksi) untuk proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS	100%	September 2010		Kemenkeu	
		Kajian dan tindak lanjutnya bagi pembentukan unit pelaksana pembangunan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS di Kementerian/Lembaga	100%	Desember 2010		KemenHub, Kemen PU, KemenInfo, ESDM	
		Panduan umum pelaksanaan KPS	100%	Juni 2010		KemenPPN	
		Panduan pelaksanaan KPS per sektor infrastruktur	100%	Desember 2010		Kemen PU, ESDM	
		Daftar Rencana Proyek KPS 2010-2014 (PPP Book)	100%	April 2010		KemenPPN	
		Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	323 km	Desember 2010	Kemen PU	Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat	
		Jumlah rute perintis yang terlayani (laut)	15	Desember 2010	Kemenhub	Daerah terkait	
		Lintas bus perintis	29	Desember 2010			
		Jumlah rute perintis yang terlayani (udara)	39	Desember 2010			
	Penyelenggaraan perhubungan						



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>*)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>*)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Penyederhanaan prosedur investasi dan usaha	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara elektronik (SP, IP, ISE) pada PTSP	Jumlah perizinan dan non perizinan sektor yang dilayani SPIPISE (setelah dilakukan penyederhanaan tata cara permohonan)	3 sektor	Desember 2010	Menurunnya hambatan investasi	BKPM	
		Jumlah PTSP provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan SPIPISE	33 provinsi dan 40 kabupaten/kota	Desember 2010			Seluruh Provinsi; Kab/Kota terkait
		Jumlah instansi yang terintegrasi dengan SPIPISE	16 instansi	Desember 2010			
		Penetapan kualifikasi kelembagaan PTSP	130 PTSP	Desember 2010			
		Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal	1	Desember 2010			
	Rekomendasi pembatalan Perda bermasalah terkait investasi dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Jumlah Perda yang dikaji dan diusulkan untuk dibatalkan	1 paket	Desember 2010		Kemendagri	Daerah terkait
	Jumlah perizinan dan nonperizinan sektor untuk memulai usaha yang diusulkan untuk diturunkan/dihapuskan biayanya	1 paket	Desember 2010	Kemendag			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
Pengembangan Sistem Pelabuhan Nasional	Peningkatan pengelolaan dan pelayanan pelabuhan nasional	Tersusunnya Sistem Informasi Kargo Nasional	1 paket	Desember 2010	Terbangunnya Sistem Pelabuhan Nasional yang terpadu, efisien dan efektif	Kemenhub	
		Jumlah peraturan perundangan, peraturan pelaksanaan teknis, dan laporan kajian dalam rangka penataan pelabuhan nasional	2 paket terdiri dari <i>Masterplan</i> 7 lokasi dan inventarisasi aset Otoritas Pelabuhan	Desember 2010		Kemenhub	
		Jumlah lokasi pelabuhan strategis dan komoditas yang dibangun dan direhabilitasi	3 lokasi (Belawan, Bitung, Tanjung Priok)	Desember 2010		Kemenhub	Pemprov Sumut; Pemprov Sulut; Pemprov DKI Jakarta
		Tersusunnya <i>detail design</i> dan persiapan konstruksi pel Tanjung Priok dan Belawan dan lanjutan pembangunan Pelabuhan Bitung, pelabuhan dan jalan akses	3 lokasi	Desember 2010		Kemenhub	Pemprov Sumut; Pemprov Sulut; Pemprov DKI Jakarta
		Pengoperasian CATS di Jababeka Cikarang dalam rangka proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan	1 lokasi	Desember 2010		Kemenkeu	
Peningkatan kelancaran pelaksanaan ekspor-impor	Pemantapan pengembangan dan penerapan sistem <i>National Single Window/NSW</i> dan <i>ASEAN Single Window/ASW</i>	Persentase rekomendasi di bidang pengembangan dan penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan	80%	Desember 2010	Beroperasinya secara penuh NSW di 5 pelabuhan utama	Kemenko Perekonomian	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>3)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>7)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
	Pengelolaan fasilitasi ekspor-impor	Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor-impor (peraturan)	4	Desember 2010		Kemendag	
		Jumlah pengguna perijinan ekspor/ impor <i>online</i> melalui INATRADE (perusahaan)	1,500	Desember 2010		Kemenkeu	
	Perumusan kebijakan dan pengembangan teknologi informasi kepabeanan dan cukai	Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC	100%	Desember 2010			
		Persentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanan yang terintegrasi dengan portal NSW	-	Desember 2010			
		PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan	-	Desember 2010			
		PMK tentang <i>Authorized Economic Operator (AEO)</i> dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional	-	Desember 2010			
		PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan sistem logistik	-	Desember 2010			
	Pelaksanaan <i>National Single Window</i> di sektor perhubungan	Jaringan <i>System National Single Window</i> di kantor pusat	1 paket	Desember 2010		Kemenhub	
Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha	Penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan Pusat dan Daerah	Tersusunnya rancangan peraturan kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT dan <i>outsourcing</i> ), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja	Naskah akademis	Desember 2010	Meningkatnya kepastian berusaha	Kemenakertrans	
		Harmonisasi kebijakan jaminan sosial		Desember 2010		Kemenakertrans	
		Selarasnya peraturan bidang HI	Inventarisasi Perda HI	Desember 2010			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
		Mekanisme perundingan secara <i>bipartit</i> , pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB	2 naskah	Desember 2010		Kemenakertrans	
Pengembangan perdagangan dalam negeri	Penguatan monitoring dan supervisi pelayanan perizinan SIUP dan TDP	Terlaksananya monitoring dan supervisi pelayanan perizinan SIUP dan TDP kepada Pemda kabupaten/kota dan identifikasi PERDA yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbitan SIUP dan TDP	100 kab/kota	Desember 2010	Meningkatnya perdagangan dalam negeri	Kemendag	Kab/kota terkait
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Penyusunan peraturan perundangan bagi pengembangan (KEK)	Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus pelaksanaan UU No 39/2009	1	Desember 2010	Ditetapkannya 1 KEK	Kemendag	
		Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)	1	Desember 2010		Kemenko Perekonomian	
		Tersedianya PMK-PMK ttg pemberian fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema pembiayaan infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	100%	Desember 2010		Kemendag	
	Pengembangan kelembagaan KEK	Pembentukan Dewan Nasional KEK	1 paket	Desember 2010		Kemenko Perekonomian	
		Sosialisasi dalam rangka pengembangan dan promosi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	6 daerah dan 4 negara	Desember 2010		BKPM	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 8 : ENERGI

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>3)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>3)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan kapasitas penyediaan listrik	Penanganan kebutuhan listrik jangka pendek di berbagai daerah	Meningkatnya jumlah kapasitas genset secara tersebar di Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur	562 MW	Desember 2010	Teratasinya krisis listrik nasional	Kemen BUMN	Daerah terkait
		Meningkatnya jumlah kapasitas pembangkit listrik yang handal melalui perbaikan/retrofit/relokasi pembangkit	207 MW	Desember 2010		Kemen BUMN	
	Penyusunan rencana pengembangan kapasitas listrik	Tersedianya dokumen RUKN & RUPTL yang direvisi	2 paket	Juni 2010		Kemen ESDM	
		Data dan informasi kebutuhan dan pertumbuhan listrik daerah dalam rangka mengatasi krisis	1 paket	Desember 2010		Kemen ESDM	
	Pengembangan PLTU skala kecil di berbagai daerah	Studi persiapan pembangunan PLTU skala kecil di berbagai daerah	1 paket	November 2010		Kemen ESDM	
Pengembangan infrastruktur gas	Pengawasan Pembangunan FSRT di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur	Terlaksananya kegiatan persiapan pembangunan FSRT di Sumatera Utara dan Jawa Barat serta kajian FSRT di Jawa Timur	1 paket	Desember 2010	Terealisasinya pengawasan persiapan pembangunan FSRT di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur	Kemen ESDM	Pemprov Sumut; Pemprov Jabar; Pemprov Jatim
	Pembangunan <i>Small Scale LNG receiving terminal</i> dan distribusi	Kajian dan FEED pembangunan model <i>Small Scale LNG receiving terminal</i>	1 paket	Desember 2010		Kemen ESDM	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

PRIORITAS 8 : ENERGI

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
Ketahanan energi	Peningkatan pasokan listrik	Pembangkit, jaringan dan gardu transmisi :			Meningkatnya penyediaan listrik			
		- Kapasitas pembangkit MW), transmisi (Kms) dan gardu induk (MVA)	22 MW, 3381 Kms, 2159 MVA	Desember 2010		Kemen ESDM		
		Jaringan dan gardu distribusi :						
		- Gardu dan jaringan (Kms/MVA)	18.004 dan 1.266	Desember 2010		Kemen ESDM		
	Pengembangan Geothermal	Penambahan kapasitas PLTP (MW)	70	Desember 2010		Kemen ESDM		
		Revisi PP No.68/1998 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KPA/KSA)	1 judul	Desember 2010		Kemenhut		
	Pengembangan energi alternatif diluar panas bumi	Lisdes (EBT) :						
		- PLTS 50 Wp tersebar (MW)	3.55	Desember 2010		Kemen ESDM-DAK		
		- PLTMH (MW)	1.53	Desember 2010		Kemen ESDM-DAK		
		- Jumlah studi kelayakan energi laut (laporan)	1	Desember 2010		Kemen ESDM		
		DME	50 lokasi	Desember 2010		Kemen ESDM		
		Terlaksananya sosialisasi pengembangan energi nuklir untuk mencapai pemahaman masyarakat yang utuh		Desember 2010		Kemenristek/BATAN		
Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan dan rumah tangga	FEED pemanfaatan gas bumi untuk angkutan umum di 3 kota	3 kota	Desember 2010	Kemen ESDM				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

**PRIORITAS 8 : ENERGI**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Terbangunnya Jaringan Gas Kota	4 kota/ 16.000 SR	Desember 2010		Kemen ESDM	Kota terkait
	Penerapan <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) batubara	Keputusan Menteri untuk penerapan DMO batubara tahun 2010	1	Maret 2010		Kemen ESDM	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>2)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>3)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
Pengelolaan hutan	Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas	Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800 ribu ha	239.000 ha	Desember 2010	Menurunnya tingkat kerusakan hutan dan emisi karbon	Kemenhut	Daerah terkait	
		Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500 ribu ha	100.000 ha	Desember 2010				
		Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha	1.000 ha	Desember 2010				
		Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	60.000 ha	Desember 2010				
		Fasilitasi rehabilitasi kawasan konservasi/lindung	100.000 ha	Desember 2010				
	Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha	400.000 ha	Desember 2010		Kemenhut	Daerah terkait	
		Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm	100 klpk	Desember 2010				
		Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 ha	50.000 ha	Desember 2010				
		Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK unggulan di 30 kabupaten	6 Kab	Desember 2010				30 kab terkait
		Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha	100.000 ha	Desember 2010				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat	Terwujudnya pemberian ijin HTI/HTR kumulatif seluas 3 juta ha dan penanaman kumulatif seluas 2,65 juta ha	Ijin HTI/HTR 450 ribu ha, Penanaman HTI/HTR seluas 450 ribu ha	Desember 2010		Kemenuh	Daerah terkait
	Pengelolaan dan pengembangan konservasi laut pada kawasan perairan tawar dan payau	Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha	900 ribu ha	Desember 2010		Kemen KP	Daerah terkait
Penurunan jumlah <i>hotspot</i> kebakaran hutan	Pengendalian kebakaran hutan (dan lahan)	<i>Hotspot</i> di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun.	20%	Desember 2010	Menurunnya kejadian dan luas areal kebakaran hutan dan lahan	Kemenuh	Daerah terkait
		Luas kawasan hutan (dan lahan) yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008	10%	Desember 2010			
		Tersedianya data sebaran <i>hotspot</i> di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasikan ke K/L dan daerah terkait, sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan mekanisme pencegahan kebakaran hutan	80%	Desember 2010		KLH	Provinsi terkait
Gerakan Menanam Pohon	Penanaman dan pemeliharaan pohon di sepanjang ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi, ruas jalan kab/kota serta di sepanjang bantaran sungai	Teridentifikasinya lokasi, potensi lahan, dan jumlah pohon	100%	Desember 2010	Berkurangnya emisi karbon dan erosi	Kemen PU	Daerah terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>3)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>4)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan pengelolaan DAS serta pengelolaan hutan dan lahan gambut	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas	22 DAS	Desember 2010	Menurunnya kerawanan bencana di DAS dan lahan gambut	Kemenhut	
		Terbangunnya <i>baseline</i> data pengelolaan DAS di 36 BPDAS	7 BPDAS	Desember 2010			
		Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS	7 BPDAS	Desember 2010			
	Pengelolaan kualitas air dan kawasan gambut	% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/ kota untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kab/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah	25%	Desember 2010		KLH	Daerah terkait
		Penyelesaian pemetaan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsi yang terkoordinasi dengan K/L terkait	20%	Desember 2010	KLH	Daerah terkait	
Penurunan beban pencemaran lingkungan	Pengendalian pencemaran air dan udara	Menurunnya beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 690 kegiatan industri dan jasa	680	Desember 2010	Penurunan pencemaran lingkungan dan emisi karbon	KLH	
	Penyusunan peta kerentanan perubahan iklim sampai ke tingkat regional	Tersusunnya daftar kriteria baku kerusakan LH akibat perubahan iklim		Desember 2010		KLH	
Peningkatan pengelolaan persampahan	Peningkatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menerapkan <i>sanitary land fill</i> dan mengoptimalkan program 3R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> )	Berkurangnya volume sampah melalui 3 R ( <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> ) dalam skala kota untuk kota besar dan metropolitan	26 kota besar dan metropolitan	Desember 2010	Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan	KLH	Kota terkait
		Jumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur persampahan (TPA Regional)	6 TPA Regional melayani 17 kab/kota	Desember 2010		Kemen PU	Kab/kota terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

**PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>3</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>7</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
		Jumlah kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur persampahan ( <i>Sanitary Landfill</i> )	49 kab/kota	Desember 2010		Kemen PU	Kab/kota terkait	
		Jumlah lokasi prasarana persampahan terpadu 3 R	50 lokasi	Desember 2010		Kemen PU	Daerah terkait	
Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Pemantapan sistem peringatan dini terhadap gempa bumi dan tsunami	Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS	100%	Desember 2010	Beroperasinya TEWS dan berkembangnya peringatan dini iklim dan cuaca	BMKG, Bakosurtanal, BPPT		
		Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempa bumi dan tsunami	90%	Desember 2010				
		Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami	90%	Desember 2010				
Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan	16 Prov	Desember 2010	Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana di pusat dan daerah secara efektif dan efisien	BNPB	Daerah terkait	
		Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana		Desember 2010				
		Terlaksananya pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan	16 Prov	Desember 2010				
		Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana		Kuartal ke II 2010				
	Penyediaan sarana dan prasarana pada daerah yang sering terjadi kebakaran hutan/pekarangan/lahan sebelum musim kemarau berlangsung	Terpenuhinya kebutuhan minimal sarana prasarana di 35 DAOPS dan 19 kabupaten rawan kebakaran	9 paket	Desember 2010			Kemenhut	Kab/kota terkait
		Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Jumlah rencana kontijensi yang tersusun; dan	5		Kuartal ke II 2010		BNPB
Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat (SRC-PB)	Kuartal ke II 2010							



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yang dilaksanakan	27	Desember 2010	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik	KPDT	Daerah terkait
	Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika	Prosentase desa yang dilayani akses internet (dengan prioritas pada seluruh desa Ibukota Kecamatan di wilayah <i>Universal Service Obligation</i> , sejumlah 4.218 desa)	5%	Desember 2010		Kemenkominfo	Daerah terkait
		Prosentase ibukota provinsi yang memiliki <i>National Internet Exchange (4 kota)</i>	10%	Desember 2010		Kemenkominfo	Kota terkait
		Jumlah Desa Informatif termasuk ketersediaan radio komunitas	15 desa	Desember 2010		Kemenkominfo	Daerah terkait
	Peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan penerima tunjangan khusus	46.300 orang	Desember 2010		Kemendiknas	
		Jumlah guru madrasah penerima tunjangan khusus	5.000 orang	Desember 2010		Kemenag	
	Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk pembangunan daerah tertinggal	Meningkatnya koordinasi lintas sektor	20%	Desember 2010		KPDT	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

**PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
	Penyelenggaraan perhubungan di daerah tertinggal	Unit kapal perintis	2	Desember 2010		Kemenhub	Daerah terkait	
		Jumlah rute perintis yang terlayani (laut)	45	Desember 2010		Kemenhub		
		Lintas bus perintis	118	Desember 2010		Kemenhub		
		Unit bus perintis	37	Desember 2010		Kemenhub		
		Jumlah sarana SDP	18	Desember 2010		Kemenhub		
		Jumlah lintas SDP	91	Desember 2010		Kemenhub		
Pemantapan keutuhan wilayah NKRI	Pelaksanaan perundingan perbatasan RI-Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Palau.	Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan maritim dan darat	12 perundingan	Desember 2010	Mantapnya keutuhan wilayah melalui membaiknya pengelolaan perbatasan	Kemenlu		
		Pembentukan Badan Nasional Pengelola Daerah Perbatasan	Terbentuknya organisasi Badan Nasional Pengelola Daerah Perbatasan	100%		Juni 2010		Kemendagri
		Pemetaan batas wilayah	Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000	72		Desember 2010		Bakosurtanal
			Jumlah pemetaan pulau-pulau terluar	25				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 39 -

**PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK**

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia	22				
		Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL	60				
		Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat	3				
		Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim	3				
	Inventarisasi data dan penamaan pulau-pulau kecil terluar	Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	Desember 2010		Kemen KP	Daerah terkait
		Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastruktur memadai secara terintegrasi, termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	Desember 2010			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>2</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>3</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan kekayaan budaya/ kepurbakalaan	Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya	Kesepakatan bentuk pengelolaan terpadu cagar budaya (Kawasan Warisan Budaya Dunia yang dimulai dengan Candi Borobudur, Situs Manusia Purba Sangiran, dan Candi Prambanan)	100%	Desember 2010	Meningkatnya kualitas pengelolaan kekayaan budaya kepurbakalaan	Kemenbudpar	Pemprov Jateng dan Pemprov DIY
	Revitalisasi museum	Museum Negeri Jatim (Surabaya), Museum Negeri Kalbar (Pontianak), Museum Negeri Jambi (Jambi), Museum Negeri NTB (Mataram)	4	Desember 2010			Pemprov Jatim, Pemprov Kalbar, Pemprov Jambi, Pemprov NTB
Pengembangan kapasitas inovasi	Penguatan kelembagaan inovasi dan pelaksanaan insentif Iptek	Jumlah paket riset dasar	44	Desember 2010	Meningkatnya kualitas	KemenRistek	
		Jumlah paket riset terapan	78	Desember 2010			
		Jumlah paket	92	Desember 2010			
		Jumlah paket insentif	130	Desember 2010			
	Pemberian insentif <i>Tax Deductible</i> bagi perusahaan yang melakukan R&D	100%	Desember 2010		Kemenkeu		
Pengembangan ekonomi kreatif	Pengembangan <i>database</i> ekonomi kreatif Indonesia dan peningkatan promosi produk kreatif potensial lokal dan nasional	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan dan akses pembiayaan	400 UKM	Desember 2010	Meningkatnya peran ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional	Kemendag	
		Persentase pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang tercantum dalam <i>database on-line</i>	20%	Desember 2010			
		Jumlah <i>brand roduct</i> ekonomi kreatif yang dihasilkan	26 brand	Desember 2010			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>2)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>3)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Pemantapan reintegrasi Aceh	Penyusunan peraturan perundangan untuk memperkuat reintegrasi Aceh	Terbitnya 3 PP dan 2 Perpres tindak lanjut UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh	100%	Desember 2010	Mantapnya pelaksanaan reintegrasi Aceh	Kemendagri	Pemprov NAD
Pengamanan NKRI dan penanggulangan tindak terorisme	Pemantapan penanggulangan tindak terorisme	Terselenggaranya rapat koordinasi, sosialisasi, dan kerja sama internasional dalam upaya penanggulangan terorisme	12 kali	Desember 2010	Terwujudnya NKRI yang lebih kokoh dan menurunnya tindak terorisme	Kemenko Polhukam	
		Terbitnya Perpres tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT) dan tersusunnya Rencana Induk Program Deradikalisasi	100%	Juni 2010		Kemenko Polhukam	
		Jumlah pengungkapan perkara tindak pidana terorisme dan <i>Clearance Rate</i> tindak pidana terorisme tingkat nasional	100%	Desember 2010		POLRI	
	Penyusunan RUU Keamanan Nasional	Draft RUU Keamanan Nasional	100%	Desember 2010		Kemenhan	
	Pemberian tunjangan khusus bagi TNI yang bertugas di kawasan perbatasan	Perpres tentang tunjangan khusus bagi TNI yang bertugas di kawasan perbatasan	100%	Desember 2010		Kemenhan	
Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan pelaksanaan pemberantasan korupsi	Jumlah penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan	145 pkr	Desember 2010	Menurunnya tindak pidana korupsi	Kejagung	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari, dan Cabjari	1.700 pkr	Desember 2010		Kejagung	
Peningkatan sarana dan prasarana lembaga peradilan	Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	Jumlah pembangunan Lapas/Rutan baru	19	Desember 2010	Menurunnya <i>over capacity</i> pada Lapas	Kemenhukham	
		Jumlah pembangunan lanjutan Lapas/Rutan	45	Desember 2010			
		Jumlah pembangunan Lapas/Rutan akibat bencana	9	Desember 2010			
		Sarana dan prasarana Lapas/Rutan	200	Desember 2010			
Peningkatan kemampuan peralatan pertahanan keamanan	Penyusunan RUU tentang revitalisasi industri strategis pertahanan dan keamanan nasional	Draft RUU tentang revitalisasi industri strategis pertahanan dan keamanan nasional	100%	Desember 2010	Terpenuhinya peralatan pertahanan dan keamanan	Kemenhan	
	Penyusunan rencana induk dan <i>road map</i> revitalisasi industri pertahanan	Dokumen rencana pengembangan dan pengadaan	100%	Desember 2010		Kemenhan	
	Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai <i>Clearing House</i>	Perpres pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan	100%	Desember 2010		Kemenhan	
	Penelitian, pengembangan dan pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dalam negeri	Jumlah model dan/atau <i>prototype</i> alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri	30%	Desember 2010		Kemenhan	
	Pengadaan alutsista hasil industri dalam negeri	Jumlah produksi alutsista TNI industri dalam negeri	20%	Desember 2010		Kemenhan, TNI, Kemenkeu	
	Pengadaan alat Polri produksi dalam negeri	Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis produksi dalam negeri Polri yang memenuhi	20%	Desember 2010		POLRI, Kemenkeu	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG PEREKONOMIAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan industri nasional	Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, <i>oleochemical</i>	<i>Business Plan</i> Nasional Industri Hilir Kelapa Sawit	1 paket	Desember 2010	Menguatnya struktur dan berkembang daya saing industri nasional	Kemenperin	
		Penyelesaian AMDAL, FS dan <i>Business Plan</i> oleh Pemda Sumut, Riau (Kuala Enok dan Dumai), Kaltim	1 paket	September - Desember 2010			
	Pengembangan klaster industri berbasis migas kondensat	Kajian pembangunan <i>refinery</i> di Jatim dan bahan baku alternatif dalam dan luar negeri	2 paket	Desember 2010			
		Koordinasi pengalokasian bahan baku migas dan <i>kondensat</i> di Jawa Timur dan Kaltim	2 paket	Desember 2010			
		Kajian bahan baku alternatif	1 paket	Desember 2010			
		Penyusunan <i>Business Plan</i>	1 paket	Desember 2010			
Pemasyarakatan kewirausahaan dan pengembangan wirausaha baru.	Peningkatan pemasyarakatan kewirausahaan dan penyediaan dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis, serta pola-pola pengembangan lainnya.	Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan	2.000 orang	Desember 2010	Meningkatnya jumlah wirausaha baru	Kemen KUKM	Daerah terkait
		Jumlah tempat pendidikan keterampilan usaha (TPKU) yang dibangun.	200 unit	Desember 2010			
		Jumlah calon wirausaha baru.	1.000 orang	Desember 2010			
		Terfasilitasi wirausaha baru melalui pendampingan.	350 KUMK	Desember 2010			
		Meningkatnya kemampuan usaha UKM melalui inkubator.	10 inkubator	Desember 2010			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG PEREKONOMIAN

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN <sup>1)</sup>		TARGET PENYELESAIAN <sup>2)</sup>	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI	Penyusunan skim pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Tersedianya kebijakan pembiayaan kredit untuk TKI	1 paket	Desember 2010	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan TKI secara menyeluruh	Kemenko Perekonomian	
		Penyempurnaan skim asuransi dan remitansi untuk TKI	1 paket	Desember 2010		Kemenko Perekonomian	
	Peningkatan pembinaan, perlindungan dan pelayanan TKI	Penyusunan <i>Grand Design</i> pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri	1 dokumen	Desember 2010		Kemenlu	
		Jumlah <i>Citizen Services</i> yang diperkuat	24 <i>citizen service</i>	Desember 2010		Kemenlu	
		Jumlah WNI bermasalah yang diberikan bantuan hukum	3.000 orang	Desember 2010		Kemenlu	
		% calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja provinsi dan kab/kota	100% calon TKI terlayani	Desember 2010		Kemenakertrans	
		Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya	Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran	Desember 2010		Kemenakertrans	
		Terlaksananya langkah persiapan amandemen UU 39/2004	1 paket	Desember 2010			
		Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan TKI	13 atase	Desember 2010			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN		TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar	Peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji (210.000)	Biaya operasional kantor misi haji Indonesia di Arab Saudi		Desember 2010	Terlaksananya pelaksanaan ibadah haji dengan lebih baik	Kemenag	
		Jumlah kabupaten dan kota yang terpasang Siskohat <i>online</i>	75	Desember 2010			
		Jumlah Siskohat yang di <i>upgrade</i>	260	Desember 2010			
		Jumlah asrama haji yang direhabilitasi	6	Desember 2010			
		Persentase kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar	30	Desember 2010			
Peningkatan pariwisata	Peningkatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan ( <i>sales mission</i> ), dan dukungan penyelenggaraan festival ( <i>event</i> )	72	Desember 2010	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	Kemenbudpar	
		Jumlah penyelenggaraan promosi langsung ( <i>direct promotion</i> ), dan penyelenggaraan <i>event</i> pariwisata berskala nasional dan internasional.	43	Desember 2010			
Peningkatan prestasi olahraga Indonesia	Penyiapan atlet andalan dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah atlet andalan untuk persiapan Asian Games dan Sea Games serta tersedianya sarana dan prasarana Sea Games	518 atlet	Desember 2010	Meningkatnya prestasi olahraga di kejuaraan internasional	Kemenpora	
Peningkatan partisipasi pemuda dalam Gerakan Kepanduan	Pengembangan Gerakan Kepanduan	Tersusunnya kebijakan pengembangan kepanduan	100%	Desember 2010	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam Gerakan Kepanduan	Kemenpora	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 46 -

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROGRAM (1)	TINDAKAN (2)	KELUARAN *) (3)		TARGET- PENYELESAIAN *) (4)	SASARAN (5)	INSTANSI PENANGGUNG- JAWAB (6)	PEMERINTAH DAERAH (7)
Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Peningkatan jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan	Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	2	Desember 2010	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan	Kemen PP&PA	
		Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan	3	Desember 2010			
		Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri dan perdagangan	4	Desember 2010			
Perlindungan anak	Peningkatan jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak	Jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak	2	Desember 2010	Meningkatnya upaya perlindungan anak	Kemen PP&PA	

\*) Target capaian dan waktu penyelesaian dapat disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

